

**SKRIPSI**

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN  
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**Pembimbing :**

**Didi Nazmi,S.H., M.H**  
**Delfina Gusman,S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN  
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

( Feby Afrilia Utami, 1910111076, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 85 halaman, Tahun 2023)

Pembimbing: Bapak Didi Nazmi, S.H., M.H dan Ibu Delfina Gusman,S.H., M.H  
**ABSTRAK**

Pemenuhan Hak Kesehatan Panitia Pengawas Kecamatan merupakan suatu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi oleh negara melalui pemerintah dan pemerintah wajib turut serta dalam pemenuhan hak kesehatan. Dimana pemenuhan hak kesehatan ini mengacu pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menjelaskan setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Namun demikian mengenai hak kesehatan panitia pengawas kecamatan memerlukan definisi yang lebih jelas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak kesehatan panitia pengawas kecamatan. Apakah hak kesehatan panitia pengawas kecamatan sudah terlaksana dengan baik dan siapa yang turut bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak kesehatan panitia pengawas kecamatan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu. Pertama, Bagaimana pengaturan hak kesehatan panitia pengawas kecamatan dalam pelaksanaan pemilihan bupati tahun 2020 pada masa pandemi covid-19? Kedua, Bagaimana pemenuhan hak kesehatan panitia pengawas kecamatan dalam pelaksanaan pemilihan bupati kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 pada masa pandemi covid-19? Serta tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hak kesehatan panitia pengawas kecamatan. Untuk mengetahui pemenuhan hak kesehatan panitia pengawas kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian yang telah diperoleh, pengaturan hak kesehatan panitia pengawas kecamatan telah diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019. Serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pemenuhan hak kesehatan panitia pengawas kecamatan sudah terpenuhi namun, masih terdapat kendala-kendala yang belum terlaksana dengan baik.